

dan pada masa perlu mengemukakan
keberhasilan tanpa disadari masa pada
dan melecehkan ketertarikan serta kegagah-

ketika ORF dapat mendemonstrasikan prak-
tik budaya politik yang bermoral tinggi
berdasar norma dan etika yang berwujud
pada Pancasila. Praktek ini akan menon-
takan aspek kampanye dan Pemilu men-

Bung Hatta dan Kedaulatan Rakyat: Sebuah Pemikiran

Slamet Sutrisno

Adalah George Bernard Shaw yang di tahun 1948, di musim bunga, mengusulkan diadakannya pertemuan yang dihadiri oleh kaum intelektual dan ahli pikir sedunia guna berupaya menghilangkan salah paham dan kekacauan pengertian tentang demokrasi.¹ Ini mencerminkan tidak adanya kesepakatan dalam mengartikan konsep demokrasi. Tidak setiap pemikir, penguasa dan sistem pemerintahan yang demokratis mempunyai, dan mengacu pada pengertian tunggal mengenai demokrasi. Perbedaan pengertian itu dapat disebabkan oleh penafsiran variatif atas suatu pokok soal; namun bisa bersebab lebih mendasar bahwa secara konseptual pokok soal itu -- yakni, demokrasi -- memang mengandung substansi yang berbeda.

yang menjadi fundasi demokrasi ini pada gilirannya menimbulkan reaksi. Paham reaktif ini juga bertujuan memurnikan demokrasi yang "sungguh-sungguh demokrasi" dalam bandul demokrasi rakyat. Ia pun mendominasi perikehidupan banyak warga dunia melalui jalur kekangan ideologis -- yang ternyata gagal. Bangsa-bangsa Eropah Timur yang diperintah rezim totaliter menyangka dirinya lebih benar dalam berdemokrasi, tetapi kini justru berubah sikap.

Polarisasi konsep demokrasi dan penerapannya di antara kelompok masyarakat bebas dan rezim totaliter itu secara klasik menunjukkan arah-arrah variatif dalam mengisi demokrasi, yang notabene berdasar atas pemahaman ideologis. Bagi kelompok yang pertama, demokrasi adalah ideologi itu sendiri, seperti dalam tradisi Amerika yang menempatkannya bukan hanya dalam dunia politik melainkan menjadi pandangan hidup. Menurut Michael Novak sistem demokrasi Amerika mempunyai tiga dimensi: politik, ekonomi, dan kultural. Sistem yang dimiliki Amerika bukan bersifat kapitalis semata-mata, melainkan juga bersifat demokratis dalam kehidupan poli-

Bagi bangsa-bangsa Barat, demokrasi berimplikasi masyarakat bebas sebagai konsekuensi dari paham hidup liberalistik dengan sejarah kebudayaan yang panjang. Produk sejarah atas kebebasan individual

¹William Ebenstein, *Today's Isms* (London: Prentice-Hall International, 1965), 131.

tiknya dan liberal dalam kehidupan kulturalnya.²

Sebaliknya bagi kelompok masyarakat yang kedua, demokrasi proletariat yang pernah dibanggakan itu justru terjepit di antara ideologi yang kaku. Dalam prakteknya demokrasi model itu tidak menunjukkan bukti empiris kecuali matinya demokrasi itu sendiri.

Bangsa kita telah menimba pengalaman dalam percobaan yang gagal, baik atas paham demokrasi Barat Liberal maupun demokrasi yang kemudian totaliter, yakni Demokrasi Terpimpin. Pengalaman tahun 1950-an telah menyebabkan beban yang melelahkan karena justru mengundang "penyakit-penyakit demokrasi" yang berkepanjangan sehingga sulit mencapai tujuan negara melalui pergulatan politik (yang demokratis). Penerapan demokrasi liberal dalam sistem politik waktu itu ternyata justru menimbulkan berbagai distorsi sehingga secara disfungsiional menghambat tumbuhnya stabilitas pemerintahan.

Selanjutnya, teori pendulum mulai berlaku tatkala Presiden Soekarno memaksanakan Demokrasi Terpimpin, yang pada gilirannya tidak lagi bersedia mentolerir perbedaan pendapat sebagai esensi penting demokrasi. Demokrasi Terpimpin telah dipraktikkan secara bertentangan dengan alur konseptualnya sendiri, dan keterpempimpinan yang seharusnya diperankan oleh "hikmat kebijaksanaan" bergeser ke arah sentra kuasa pribadi.

Usaha untuk menelusuri pikiran Bung Hatta mengenai demokrasi menjadi relevan, karena dewasa ini bangsa kita meng-

anut paham Demokrasi Pancasila, yang idiil berdasarkan Pancasila dan struktural berdasar atas Undang-Undang Dasar 1945. Pikiran Bung Hatta kiranya perlu dikaji berkenaan dengan urusan demokrasi bangsa kita. *Pertama*, Demokrasi Pancasila sendiri mengandung aspek eksperimentasi--bahkan eksperimentasi besar--yang melahirkan variasi dalam membangun pemahaman baru mengenai demokrasi di negeri kita. *Kedua*, Bung Hatta merupakan salah seorang peletak dasar demokrasi dalam konstitusi 1945, yang karenanya secara konseptual Demokrasi Pancasila mengandung pemikiran Bung Hatta. *Ketiga*, ide keterbukaan yang muncul belakangan ini menuntut adanya demokratisasi sebagai dasar pemikiran. Aspek terakhir ini tercermin pada pembentukan Forum Demokrasi oleh Abdurrachman Wahid dkk. Budaya demokrasi seperti yang dikehendaki oleh Forum Demokrasi ini sebenarnya sudah dicetuskan oleh Hatta sejak tahun 1920-an.

Hatta mengatakan bahwa "Kemerdekaan seharusnya tidak melahirkan suatu bangsa di mana mayoritas rakyatnya tidak memiliki kekuasaan, seperti pada periode kolonial. Konsep Hatta tentang pemerintahan demokratis serta kemakmuran sosial dan ekonomi bagi rakyat disebutnya *kedaulatan rakyat*."³ Ditegaskan pula bahwa bukan kedaulatan negara yang harus dominan, melainkan kedaulatan rakyat. Selain itu, suatu sistem demokrasi yang sempurna ialah yang memerintah dari bawah. Rakyat harus bisa merasa bahwa mereka memerintah dirinya sendiri.⁴ Artinya, hanya akan ada keadilan di dalam suatu negara jika prinsip-prinsip dasar pemerintahan muncul

²Miriam Budiardjo (ed.), *Simposium Kapitalisme, Sosialisme, Demokrasi* (Jakarta: PT. Gramedia, 1984), 60.

³Mavis Rose, *Indonesia Merdeka: Biografi Politik Mohammad Hatta*, alih bahasa oleh: Hermawan Sulistiyo (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991), XVI.

⁴Ibid., 238.

dari rakyat sendiri.⁵ Dalam pandangan Hatta, akar-akar demokrasi harus diasuh dan bukan dipatahkan sebelum bisa tegak dan berkembang menjadi matang.⁶

Mengikuti pikiran Hatta yang menyangkut pentingnya pemerintahan dari bawah itu (*bottom-up approach*), kiranya tidak sulit untuk memahami mengapa ia amat mementingkan otonomi daerah. Dalam hal ini, Indonesia harus memiliki sistem konstitusional yang memungkinkan daerah berkesempatan mengatur urusan mereka sendiri.⁷ Mengenai batasan hubungan antara otonomi daerah tersebut dengan kedaulatan rakyat, pada dasarnya kedaulatan yang dilakukan oleh rakyat di daerah tunduk kepada kedaulatan yang dilakukan oleh rakyat seluruhnya. Oleh karena kedaulatan rakyat Indonesia satu dan tidak berpecah-pecah, maka kedaulatan yang dilakukan oleh rakyat daerah pada hakekatnya merupakan penjelmaan pokoknya.⁸ Jika Hatta telah mencetuskan esensi demokrasi lebih dari setengah abad sebelum Forum Demokrasi dibentuk oleh Gus Dur dkk., sebenarnya Hatta pun mendahului 45 tahun gagasan Rudini. Gagasan untuk menghapus DPRD Tingkat I sebagaimana diajukan oleh Mendagri, ternyata juga telah disinggung dalam pidato Bung Hatta di depan Konferensi Pamong Praja di Solo, 7 Februari 1946; Isinya antara lain "Lingkungan sebagai Kecamatan dan Residensi dan Propinsi adalah Badan Koordinasi, dan tidak mesti mempunyai badan perwakilan rakyat."⁹

Berkaitan dengan esensi demokrasi yang harus tertanam dalam benak manusia

⁵Ibid., 305.

⁶Ibid., 312.

⁷Ibid., 190.

⁸Mohammad Hatta, *Kedaulatan Rakyat* (Surabaya: CV Usaha Nasional, 1980), 24.

⁹Ibid., 37.

agar demokrasi terhindar dari tendensi kultus formal kultus institusional, Hatta telah mengutamakan pendidikan politik rakyat. Sudah sejak masa sebelum merdeka selalu ditekankannya bahwa "Pendidikan massa dari Perhimpunan Indonesia harus bertujuan pada pembentukan karakter rakyat. Kemampuan rakyat bukanlah ditentukan pertama-tama oleh jumlah orang yang meluk huruf, melainkan oleh karakter rakyat."¹⁰

Hatta berpijak di atas postulat bahwa "Dasar pemerintahan yang adil ialah, siapa yang mendapat kekuasaan, dia itulah yang bertanggung jawab. Manakala rakyat sekurang-mendapat kekuasaan menurut dasar kedaulatan rakyat, rakyat pulalah yang bertanggung jawab."¹¹ Atas dasar postulat inilah ia sangat memandang penting pendidikan politik tersebut. Sebagaimana tercermin di dalam pernyataannya di bawah ini:

"Kalau rakyat tidak mempunyai keinsyafan politik, rasa tanggung jawab sangat kurang padanya . . . Pemerintah dan masyarakat sama-sama mempunyai kepentingan akan adanya rakyat yang mempunyai keinsyafan politik. Sebab itu didikan itu mesti datang daripada kedua belah pihak itu pula, dari Pemerintah dan dari masyarakat sendiri. Pemerintah dapat memudahkan jalan pendidikan politik itu dengan memperbesar kecerdasan umum rakyat . . . Selain daripada usaha Pemerintah, didikan politik kepada rakyat adalah *usaha yang terutama bagi partai-partai politik*."¹²

Kerangka pikiran Hatta mengenai demokrasi tidaklah rumit, khususnya yang berkenaan dengan tanggung jawab dan hak-hak rakyat. Kutipan di atas menunjukkan adanya dimensi tanggung jawab tersebut.

¹⁰Rose, *Indonesia Merdeka*, 80.

¹¹Hatta, *Kedaulatan*, 14.

¹²Ibid., 37.

sedangkan adanya dimensi hak terlihat dari sikapnya yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia.

Sikap Hatta ini sudah dimulai dalam masa perjuangan, misalnya ketika ia mengajukan kerangka proposal di depan rapat umum Perhimpunan Indonesia, 23 November 1926. Seperti dikatakan oleh Mavis Rose, Hatta juga memasukkan ketentuan mengenai perlindungan bagi hak-hak asasi, yaitu hak-hak yang dinikmati oleh mahasiswa di Eropa tetapi yang semakin hilang dari orang-orang Indonesia di koloni.¹³ Dalam konteks hak asasi ini pula, pada tahun 1969 Hatta mengangkat pena mengkritik ketidakadilan yang diderita oleh seorang tukang becak bernama Rusdi. Rakyat kecil ini ditahan karena mencuri ayam dan tidak diberi makan selama dalam tahanan, sampai akhirnya ia meninggal dalam sidang pengadilan.¹⁴ Dalam hal ini Hatta mempertanyakan "Manakah rasa tanggung jawab sebagai manusia yang beradab pada petugas yang bersangkutan? Apa artinya Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila apabila pegawainya tidak mempunyai rasa kemanusiaan?"¹⁵

Jauh sebelumnya, dalam pidatonya di depan Sidang BPUPKI tanggal 15 Juli 1945, Hatta telah menyinggung masalah perlindungan hak-hak asasi dalam negara yang akan dibentuk. Hatta menyatakan:

"Kita mendirikan negara baru di atas dasar gotong-royong dan hasil usaha bersama. Tetapi satu hal yang saya kuatirkan, kalau tidak ada satu keyakinan atau satu pertanggungan kepada rakyat dalam Undang-Undang Dasar yang mengenai hak untuk mengeluarkan suara . . . Hendaklah kita

memperhatikan syarat-syarat supaya negara yang kita bikin, jangan menjadi negara Kekuasaan . . . Sebab itu ada baiknya dalam salah satu fasal, misalnya fasal yang mengenai warga negara disebutkan juga di sebelah hak yang sudah diberikan kepada misalnya tiap-tiap warga negara rakyat Indonesia, supaya tiap-tiap warga negara rakyat Indonesia, jangan takut mengeluarkan suaranya."¹⁶

Pandangan demokrasi Hatta yang mengekspresikan dimensi hak asasi dan dimensi tanggung jawab tersebut menunjukkan bahwa ia ingin mengembangkan konsep rasional mengenai demokrasi. Rasionalitas memang menjadi salah satu ciri dan kekuatan penting dalam pemikiran Hatta. Menurut pemikiran Hatta, dalam sistem demokrasi kekuasaan bukan merupakan monopoli pemerintah. Ia menganggap kekuasaan yang dibagi lebih luas sebagai sesuatu yang paling mendekati cita-citanya tentang demokrasi.¹⁷ Bahkan secara eksplisit ia menentang pendapat yang mengatakan bahwa teori Trias Politica itu adalah teori liberal dan tidak berlaku bagi Indonesia. Ia menyatakan lebih jauh bahwa teori ini muncul "lama sebelum liberalisme muncul ke dunia" dan tujuannya tidak lain daripada menunjukkan adanya pembagian fungsi atau kekuasaan dalam melaksanakan pemerintahan.¹⁸

Meskipun Hatta menyadari bahwa bangsa Indonesia mendirikan negara baru atas dasar gotong-royong dan hasil usaha bersama, ia tidak menghendaki adanya kultur kekeluargaan yang bisa mengakibatkan distorsi. Sikap Hatta tersebut terungkap dalam kritiknya, terhadap kekuasaan Jepang sebelum masa kemerdekaan.

¹³Rose, *Indonesia Merdeka*, 57.

¹⁴Deliar Noer, *Mohammad Hatta: Biografi Politik* (Jakarta: LP3ES, 1990), 621.

¹⁵*Ibid.*, 622.

¹⁶Padmo Wahyono, "Integralistik Indonesia" dalam paper yang tidak diterbitkan (tanpa tahun).

¹⁷Rose, *Indonesia Merdeka*, 219.

¹⁸Noer, *Mohammad Hatta*, 611.

Dalam tanggapannya, ia menyatakan bahwa "Propaganda Jepang, yang menyusup masuk ke wilayah jajahan, memainkan kepekaan kultural rakyat Jawa dengan menghidupkan kembali legenda Joyoboyo.... Hatta mencerca orang-orang yang mempercayai mitos seperti itu."¹⁹ Ditambahkannya, bangsa Indonesia sebagai bangsa yang rasional, wajib meninggalkan gagasan yang membawa malapetaka seperti itu.²⁰

Kerasionalan tentang demokrasi tersebut memang erat berhubungan dengan pengertian negara hukum, sehingga "kedaulatan rakyat" dan "kedaulatan hukum" tidak bisa dipisah-pisahkan. Dalam hal ini Hatta berpendapat bahwa "Apabila kita renungkan sedalam-dalamnya, bahwa segala yang penting bagi bangsa, apalagi yang ditimpakan kepada rakyat sebagai beban materiil dan idiil, harus berdasarkan undang-undang, nyatalah bahwa negara Republik Indonesia adalah *negara hukum*."²¹ Dalam rumusannya mengenai Kedaulatan Rakyat, ia juga menunjukkan impresinya terhadap kesadaran hukum, sebagaimana tercantum di bawah ini.

"Kedaulatan Rakyat adalah pemerintahan rakyat yang dijalankan menurut peraturan yang telah dimufakati dengan bermusyawarah . . . Tak boleh ada golongan rakyat atau daerah yang melakukan tindakan sendiri, yang bertentangan dengan dasar-dasar yang ditentukan bagi negara seluruhnya."²²

Keterkaitan antara kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum juga tampak, ketika Hatta menunjukkan adanya sebuah bank

daerah di Jawa Barat yang bekerja sangat efisien di mana kredit bank untuk petani dilayani hanya dalam tempo seminggu. Dalam pendapatnya mengenai otonomi daerah dan demokrasi ekonomi, ia menegaskan "agar Presiden diyakinkan lebih dahulu dalam rangka menyempurnakan undang-undang otonomi daerah."²³ Ia juga menekankan bahwa "undang-undang bisa diubah, sebab undang-undang itu untuk rakyat dan bukan rakyat untuk undang-undang."²⁴

Selanjutnya, yang perlu dipertanyakan adalah jenis demokrasi apa yang sesungguhnya dianut oleh Hatta dan sejauh mana perkembangan pemikirannya mengenai demokrasi itu. Ada beberapa anggapan bahwa paham demokrasi dan kedaulatan rakyat yang dicetuskan oleh Hatta lebih berciri demokrasi Barat. Di masa pergerakan, anggapan tersebut cukup beralasan mengingat Hatta memperoleh pendidikan tinggi di Eropa selama 11 tahun. Sebagaimana dikatakan oleh Sjahrir, "Hatta tak diragukan lagi termasuk kaum terpelajar kita yang paling ke-Eropa-an."²⁵

Di lain pihak, tidak dapat dielakkan bahwa lingkungan sosial tempat Hatta dilahirkan, Minangkabau, sangat mempengaruhi pemikirannya tentang masyarakat yang demokratis, yang berkedaulatan rakyat. Hatta berasal dari Luhak Agam, tempat asal-usul keluarganya di mana berlaku tradisi Bodi-Caniago yang memiliki gaya egaliter dalam organisasi politik.²⁶ Di Minangkabau, keselarasan dicapai dengan cara menghadapi dan bukannya menghindari konflik.²⁷ Oleh sebab itu tidak mengherankan jika sejak zaman pergerakan ia

¹⁹Rose, *Indonesia Merdeka*, 144.

²⁰Ibid.

²¹Mohammad Hatta, *Menuju Negara Hukum* (Surabaya: CV Usaha Nasional, 1975), 13.

²²Hatta, *Kedaulatan Rakyat*, 18.

²³Noer, *Mohammad Hatta*, 701.

²⁴Ibid.

²⁵Rose, *Indonesia Merdeka*, 108.

²⁶Ibid., 2.

²⁷Ibid., 89.

sudah mengkritik Soekarno yang dipandang terlalu menekankan sentimen tradisional dalam mendesak pembuatan keputusan yang lebih menekankan konsensus ketimbang suara mayoritas.

Hatta berpendapat bahwa dalam pemerintahan moderen keputusan harus diambil atas dasar suara mayoritas.²⁸ Ia mengecam konsensus yang ala kadarnya dan menganggap lebih baik apabila "perbedaan itu dinyatakan."²⁹ Paham demokrasi Hatta pada prinsipnya merupakan campuran antara demokrasi yang tumbuh di Barat dan yang dijumpai pada masyarakat desa Indonesia, serta gabungan antara persamaan dan kebersamaan dalam Islam.³⁰

Jelas kiranya di samping demokrasi sosialistik juga merupakan ciri yang kuat dalam keutuhan pemikiran Hatta. Selain itu, prinsip Hatta mengenai kedaulatan rakyat berimplikasi pada pemerintahan yang demokratis dan kemakmuran sosial dan ekonomi, seperti terungkap dalam pernyataannya di bawah ini:

"Di sebelah demokrasi politik yang telah dicapai, mestilah diadakan demokrasi ekonomi, supaya rakyat memperoleh kenikmatan daripada kerja bersama dalam penghasilan masyarakat. . . . Dan bagi rakyat jelata yang terbanyak, demokrasi dalam perekonomian itulah yang terpenting."³¹

Dalam karangannya "Demokrasi Kita", Hatta mengemukakan kembali pemahannya tentang keadilan, kemakmuran, Pancasila, kedaulatan rakyat, demokrasi sosial, dan pendidikan politik.³² Dalam hal ini demokrasi sosial merupakan paham yang dianut oleh Hatta. Lebih jauh diakui oleh Jean-

Francois Revel bahwa demokrasi sosial merupakan "suatu sistem politik ekonomi yang telah cukup efektif dalam menyelaraskan sosialisme, kebebasan, dan pemerintahan sendiri; yang telah membuat prestasi yang bagus, baik di bidang perekonomian maupun di bidang keadilan sosial; suatu sistem yang mempunyai keuntungan tambahan yaitu mampu mempertahankan kehadirannya."³³

Selain pemikiran Bung Hatta tentang demokrasi, masih ada beberapa hal yang perlu dicatat terutama yang menyangkut kesan ambivalen Hatta sendiri mengenai integrasi antara paham Barat dengan tradisi kerakyatan Indonesia. Hatta dianggap sangat memuji sistem parlementer Barat serta kagum terhadap peradilan yang bebas dan perlindungan hak-hak asasi. Menurut Mavis Rose, "Hatta tahu bahwa ia harus bekerja sama dengan rekan-rekannya yang berasal dari Jawa, dalam rangka meyakinkan mereka bahwa demokrasi seperti yang pernah mereka alami di Eropa haruslah menjadi standar bagi Indonesia yang merdeka."³⁴ Di zaman pergerakan, Hatta juga menegaskan bahwa "Kita ingin mengatur rumah tangga kita dalam Indonesia Merdeka berdasarkan demokrasi asli yang ditemukan di masyarakat Indonesia."³⁵ Selain itu, ia mengakui urgensi modernisasi atas bentuk-bentuk pemerintahan tradisional seperti di bawah ini:

"Kami menyadari bahwa waktu telah berubah, bahwa bentuk-bentuk yang lampau tidak memadai lagi bagi Indonesia Merdeka yang berdasarkan demokrasi. Prinsip-prinsip asli tersebut harus diterapkan sesuai dengan keadaan sekarang, diangkat sampai ke tingkat yang cukup tinggi."³⁶

²⁸Ibid., 70.

²⁹Noer, *Mohammad Hatta*, 712.

³⁰Ibid., 711.

³¹Hatta, *Kedaulatan Rakyat*, 21.

³²Noer, *Mohammad Hatta*, 601.

³³Budiardjo, *Simposium Kapitalisme*, 49.

³⁴Rose, *Indonesia Merdeka*, 93.

³⁵Ibid., 102.

³⁶Ibid.

Oleh sebab itu, Hatta memutuskan untuk berpaling ke lembaga-lembaga Barat guna memberi bentuk pada cita-cita demokrasi-nya.³⁷

Mengenai demokrasi Pancasila, Hatta berpendapat bahwa pada prinsipnya demokrasi Pancasila sama dengan demokrasi sosial yang mencakup demokrasi politik dan demokrasi ekonomi.³⁸ Demokrasi Pancasila adalah "demokrasi yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa, dijalankan dengan jiwa yang murni yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawarah/perwakilan untuk mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."³⁹ Seterusnya, "Perjuangan untuk melaksanakan dan menghidupkan demokrasi Pancasila harus dikemukakan oleh sikap cinta akan kebenaran dan keadilan dan kebaikan serta dengan rasa persaudaraan dan toleransi."⁴⁰

Kalau demikian halnya, demokrasi Pancasila menurut pengertian Hatta kurang lebih dapat dirumuskan sebagai berikut. Substansinya adalah identik dengan paham Hatta sendiri tentang demokrasi, ialah demokrasi sosial yang mencakup demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Sesuai dengan namanya, demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dijiwai dan seka-

ligus mengekspresikan nilai-nilai Pancasila. Nilai etis yang dikandungnya bersumberkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa; hikmat kebijaksanaan (yang sangat dikenal-dalkan oleh rasionalitas), kebenaran—keadilan—kebaikan, yang keseluruhannya adalah manifestasi sila ke II; berasa persaudaraan dan toleransi (sila ke III); dengan sarana permusyawaratan/perwakilan (sila ke IV); dan bermuara pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai tujuannya (sila ke V).

Dalam kerangka pemahaman itu demokrasi Pancasila seharusnya bukan tipe demokrasi yang tidak bebas. Ia bukanlah demokrasi yang dalam implementasinya harus dibatasi oleh berbagai rintangan yang dapat mereduksi substansinya. Dalam kondisi yang demikian, perlu kiranya merumuskan kembali ciri-ciri pokok yang terkandung dalam demokrasi Pancasila itu. Akhirnya, perlu pula dipertanyakan apakah demokrasi Pancasila telah sesuai dengan ciri-ciri pokok demokrasi Barat seperti yang dirumuskan oleh Ebenstein seperti berikut ini: (a) empirisme rasional; (b) titik berat pada orang; (c) sifat instrumental negara; (d) kesukarelaan; (e) hukum di balik hukum; (f) titik berat pada cara; (g) perbincangan dan persepakatan dalam hubungan-hubungan manusia; dan (h) persamaan pokok di antara semua umat manusia.⁴¹

³⁷Ibid., 57.

³⁸Noer, *Mohammad Hatta*, 632.

³⁹Ibid.

⁴⁰Ibid.

⁴¹Ebenstein, *Today's Isms*, 133.